



Penguatan RAD KSB Menuju Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sintang

Dokumen ini adalah bagian dari penelitian “Perluasan Pendekatan Yurisdiksi pada Sektor Kelapa Sawit di Indonesia” yang dilaksanakan CIFOR-ICRAF dan FKMS di Kabupaten Sintang, dengan dukungan dari Walmart Foundation.

Pendahuluan

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama bagi Indonesia yang memegang peranan penting dalam perdagangan internasional maupun perindustrian. Kelapa sawit berkontribusi signifikan dan petani kelapa sawit memiliki peranan penting di dalamnya. Sayangnya, pengembangan perkebunan kelapa sawit juga berkontribusi pada laju deforestasi dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi gas rumah kaca, degradasi lahan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak-dampak lainnya.

Kelapa sawit juga memiliki relevansi dan implikasi besar bagi perempuan, yang memungkinkan perempuan berperan penting dalam proses budi daya dan pascapanen. Namun, ada beragam tantangan gender di sektor ini, salah satunya adalah kurangnya keterwakilan perempuan dalam organisasi kelompok tani kelapa sawit. Dorongan dan upaya telah dilakukan untuk mewujudkan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan, misalnya melalui sertifikasi maupun formulasi Rencana Aksi Nasional dan Daerah untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB dan RAD KSB).

Kuatnya keterkaitan lintas sektoral pada sektor kelapa sawit mendorong pentingnya sinkronisasi dan kolaborasi antarsektor dalam mengembangkan visi bersama guna mencapai keberlanjutan. Hal ini dimungkinkan dan didorong lewat pendekatan yurisdiksi (*jurisdictional approach/JA*) yang semakin dilirik sebagai jalan untuk mencapai transisi keberlanjutan. Salah satu contoh dari JA di sektor kelapa sawit di Kabupaten Sintang ditunjukkan melalui proses multipihak dalam pengembangan RAD KSB.

Dokumen kontribusi ini merupakan bagian dari kegiatan riset yang memfasilitasi pengembangan visi bersama guna memperkuat inisiatif kelapa sawit berkelanjutan pada level yurisdiksi, terutama di Kabupaten Sintang. Dokumen kontribusi ini berisi hasil analisis perdagangan, rantai pasok dan nilai, risiko dan deforestasi; yang dilengkapi dengan penggunaan kerangka teori perubahan, teori tindakan, serta kerangka pemantauan dan evaluasi. Kami juga menyajikan pemodelan beragam skenario kebijakan terkait kelapa sawit berkelanjutan melalui JAPOS (*Jurisdictional Approach of Palm Oil Simulation*).

Dinamika Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan serta Perkembangan Kelapa Sawit

Perluasan perkebunan kelapa sawit dan peningkatan lahan semak belukar menjadi penyebab utama dari hilangnya sebagian besar tutupan lahan di Kabupaten Sintang. Penurunan yang signifikan ini terjadi pada tahun 2000 sampai dengan 2019. Dari 58% total tutupan hutan alam dan hutan gambut, hanya tersisa 47% hutan alam dan hutan gambut di tahun 2019 dan sebagian besar hutan alam ini berada di bagian timur kabupaten.

Produksi Kelapa Sawit

Dari sisi produksi, ada kecenderungan kenaikan perkebunan kelapa sawit di tiga tahun terakhir dengan jumlah produksi mencapai 319.465 ton pada tahun 2021. Sebagian besar produksi ini berasal dari perkebunan besar milik perusahaan. Ada 45 izin usaha perkebunan dan 48 izin lokasi yang dikeluarkan, namun dari izin ini, hanya 189.035 ha yang sudah ditanami dari total seluas 420.000 ha. Beberapa perusahaan dan pekebun swadaya telah memiliki sertifikasi wajib, seperti ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) maupun sukarela seperti RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*), meskipun banyak juga yang sedang dalam tahap proses sertifikasi ISPO.

Perdagangan Kelapa Sawit

Kabupaten Sintang memperdagangkan 618.093 ton CPO (*crude palm oil*) dan RPO (*refined palm oil*), dan angka ini menyumbang kurang dari 1% total volume perdagangan nasional. Sebagian besar dari produksi CPO ini diperdagangkan di dalam negeri (61%) dan sisanya diekspor ke 127 negara; terutama India, China, dan negara-negara di Asia dan Uni Eropa lainnya. Produksi minyak kelapa sawit di Kabupaten Sintang sebagian besar diperdagangkan dalam bentuk CPO (74% dari volume produksi), FFB (*fresh fruit bunch*) dari perkebunan disuplai ke PKS (pabrik kelapa sawit) dan diproses menjadi CPO. Untuk pasar ekspor, CPO ini diolah lebih lanjut di *refineries* domestik menjadi RPO.

Rantai Nilai dan Ketertelusuran Rantai Suplai

Dari aspek tata kelola rantai nilai perdagangan, tidak semua rantai dagang terjadi di Kabupaten Sintang. Rantai suplai minyak sawit dari Sintang, baik di hulu dan hilir

masih dikendalikan oleh konsumen, yang sebagian besar adalah perusahaan swasta atau korporasi besar yang berperan sebagai pemasok; yang dicirikan dengan banyaknya tata kelola rantai suplai *directed network*, *hierarchy*, dan *market-based*. Dari aspek ketertelusuran rantai suplai, basis data perdagangan TRASE dapat menunjukkan rantai suplai dan tata kelola dari level PKS sampai ke konsumen akhir, namun analisis lebih lanjut diperlukan karena hanya 8% dari 172 kasus rantai dagang di TRASE yang dapat ditelusuri. Sementara itu, kurang dari 10% total luasan kebun di Sintang atau lebih dari 70% produksi minyak sawit di Sintang tidak dapat teridentifikasi afliasinya dengan rantai perdagangan grup perusahaan tertentu.

Risiko dan Permasalahan Menuju Kelapa Sawit Berkelanjutan

Dengan melakukan penilaian terhadap beragam indikator risiko hipotetis, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sintang memiliki risiko hipotetis tinggi yakni 0,72 dari 1,00. Nilai tertinggi dari risiko hipotetis ini disebabkan oleh tingginya persentase *mill* yang tidak tersertifikasi berkelanjutan dan risiko dari tidak berkembangnya JA di tingkat kabupaten untuk mendorong kelapa sawit yang berkelanjutan. Risiko-risiko lainnya yang juga penting adalah konversi hutan langsung di gambut, risiko ekspansi dari aktor lain selain pekebun rakyat, dan adanya ketidakseimbangan antaraktor kunci dalam jaringan.

Di samping risiko ini, ada tujuh kelompok permasalahan utama yang berhasil diidentifikasi, diantaranya adalah: aspek legalitas usaha, manajemen perkebunan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan usaha yang berkelanjutan, sertifikasi ISPO, serta pemantauan evaluasi, data, koordinasi dan infrastruktur. Risiko dan permasalahan yang tidak dimitigasi dapat menghambat pencapaian inisiatif kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang.

Aktor dan Jaringan Sosial Kelapa Sawit

Kami memetakan setidaknya ada 233 aktor yang membentuk 487 jaringan. Para aktor di Kabupaten Sintang ini memiliki keterkaitan dengan aktor-aktor di Provinsi Kalimantan Barat maupun nasional. Beberapa

aktor teratas dengan peranan penting dalam jaringan sosial adalah pekebun swadaya termasuk asosiasi dan koperasinya misalnya: Koperasi Produksi Rimba Harapan, masyarakat sipil, perusahaan kelapa sawit, pemerintah Kabupaten Sintang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Bappeda Kabupaten Sintang, Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Sintang, dan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) (urutan tidak berdasarkan ranking). Analisis aktor ini dipertajam dalam membangun visi bersama yang dirumuskan melalui pengembangan teori perubahan, teori tindakan, serta kerangka pemantauan dan evaluasi.

Peranan Gender di Kabupaten Sintang

Pengarusutamaan gender menjadi prioritas pemerintah daerah, khususnya dalam program-program pembangunan. Implementasi upaya ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Secara umum penduduk di Kabupaten Sintang adalah multietnis dengan dominan dari suku Dayak. Menurut budaya Sintang, hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun budaya patriarki masih mendominasi, sejauh ini, pekerja perempuan di perkebunan sawit juga mengambil peran dalam mendorong perkembangan industri sawit di tanah air, termasuk di Sintang. Banyak pekerja perempuan yang berperan dalam perawatan kebun, misalnya: menebas gulma, menyemprot pestisida, hingga memupuk dan membantu memanen, khususnya memungut brondolan-brondolan sawit.

Dukungan Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Inisiatif kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang diperkuat dengan adanya RAD KSB tahun 2018–2023 yang dilengkapi dengan adanya forum para pihak, yakni Forum Koordinasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, yang kini disahkan menjadi Tim Pelaksana Daerah (TPD). Dalam melaksanakan tugasnya, TPD juga dibantu oleh para mitra pembangunan. Ada pula beberapa regulasi lainnya yang mendukung dan secara tidak langsung terkait dengan sektor kelapa sawit, diantaranya adalah Peraturan Bupati No. 39/2019, No. 54/2016, No. 3/2020,

No. 122/2021 dan No. 72/2022, No. 49/2023, No. 82/2023 dan regulasi-regulasi lainnya yang sedang dikembangkan; serta RAD Sintang Lestari yang berakhir di tahun 2021 dan kemudian diinternalisasi melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Sintang. Adanya beragam peraturan pendukung ini berpotensi menunjang pencapaian program pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang.

Perkembangan Pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Sintang

Pada tahun 2022, rata-rata setengah dari program dan kegiatan tahunan RAD KSB sudah terlaksana (52%). Dalam implementasinya, TPD RAD KSB mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah: belum adanya sinergi antara perencanaan, pendanaan dan implementasi kegiatan RAD KSB; minimnya sumber daya manusia untuk mengawal dan mengimplementasikan RAD KSB; minimnya kesadaran pemangku kepentingan/OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam mengalokasikan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan yang disepakati dalam RAD KSB; dan kepatuhan terhadap regulasi yang dikeluarkan. Di samping itu, antusiasme masyarakat untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit masih tinggi dan komponen ini dianggarkan dalam anggaran dana desa. TPD RAD KSB melihat adanya beberapa solusi potensial, yakni: memperkuat peran para pihak, meningkatkan dukungan lembaga mitra, meningkatkan posisi tawar, dan penyediaan insentif untuk meningkatkan capaian RAD KSB.

Memperkuat visi kelapa sawit berkelanjutan dan RAD KSB Melalui teori perubahan, teori tindakan dan kerangka kerja pemantauan dan evaluasi (TTM)

Teori perubahan (*theory of change/ToC*), teori tindakan (*theory of action/ToA*) serta kerangka kerja pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation framework/MEF*), yang selanjutnya disebut sebagai TTM (ToC, ToA dan MEF); adalah sebuah alat untuk menjaring visi bersama secara partisipatif. Para pihak di Kabupaten Sintang memiliki **visi bersama untuk mewujudkan pengurangan deforestasi, peningkatan keanekaragaman hayati dan peningkatan ketahanan**

mata pencaharian masyarakat yang inklusif gender (tujuan atau dampak). Melalui serangkaian lokakarya, para pihak merumuskan indikator pencapaian yang akan ditunjukkan melalui terkelolanya area dengan nilai penting seluas 82.607 ha pada APL (areal penggunaan lain) di tahun 2030 dan terciptanya mata pencaharian lain yang terkait pada tiga subsektor (minimal) yakni peternakan, perikanan, dan hortikultura pada tahun 2030. Berdasarkan hasil penelitian, tim peneliti merekomendasikan **indikator yang lebih progresif, dengan menysasar perlindungan hutan dan nol deforestasi pada 1.087.854 ha dan penurunan deforestasi sebesar 80% di APL yang diimbangi dengan peningkatan intensifikasi sebesar 50% untuk meningkatkan pendapatan pekebun rakyat sebesar 33% dan pengembangan mata pencaharian alternatif pada tiga subsektor**. Kabupaten Sintang akan mencapai tujuan atau dampak ini melalui tiga jalur perubahan (*change pathways*) yakni: legalitas usaha, pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan pemberdayaan ekonomi serta peningkatan usaha yang berkelanjutan.

Pemodelan Dampak Kebijakan Sawit Berkelanjutan Melalui JAPOS

JAPOS adalah alat untuk memodelkan dampak skenario kebijakan kelapa sawit berkelanjutan. JAPOS dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk memahami sinergi dan imbal balik antara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. JAPOS memodelkan intervensi kebijakan yang dijabarkan dalam RAD KSB, model ini memproyeksikan masa depan sebagai dampak dari implementasi intervensi untuk mencapai kelapa sawit berkelanjutan. Pada studi ini kami mengembangkan tiga skenario yakni BAU (*business as usual*), NDP (*no deforestation and no peat*) dan kombinasi NDP dengan intensifikasi, sertifikasi dan insentif (harga premium, pajak karbon dan transfer fiskal berbasis ekologis). Skenario kebijakan kelapa sawit berkelanjutan dan kombinasi antara kebijakan ini dengan intensifikasi, sertifikasi dan insentif dapat menurunkan angka deforestasi kumulatif (90% dari BAU) dan emisi gas rumah kaca (89% dari BAU), namun akan memperlambat perkembangan perluasan perkebunan sawit (30% dari BAU) dan produksi di fase awal implementasinya (24% dari BAU).

Rekomendasi kunci untuk RAD KSB Kabupaten Sintang

Rekomendasi kunci hasil rumusan TTM dan JAPOS dijabarkan dalam matriks yang terdiri dari lima komponen, yakni: komponen penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur; komponen peningkatan kapasitas pekebun dan percepatan peremajaan; komponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan; komponen tata kelola dan penanganan sengketa; dan komponen pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses pasar produk-produk sawit.

Visi bersama Kabupaten Sintang adalah untuk **mewujudkan pengurangan deforestasi, peningkatan keanekaragaman hayati, dan peningkatan ketahanan mata pencaharian masyarakat yang inklusif gender**. Melalui lokakarya, para pihak merumuskan indikator pencapaian yang akan ditunjukkan melalui terkelolanya area dengan nilai penting seluas 82.607 ha pada APL di tahun 2030 dan terciptanya mata pencaharian lain terkait pada tiga subsektor (minimal) yakni peternakan, perikanan, dan hortikultura pada tahun 2030. Berdasarkan hasil penelitian, tim peneliti merekomendasikan **indikator yang lebih progresif, dengan menysasar perlindungan hutan dan nol deforestasi pada 1.087.854 ha dan penurunan deforestasi sebesar 80% di APL yang diimbangi dengan peningkatan intensifikasi sebesar 50% untuk meningkatkan pendapatan pekebun rakyat sebesar 33% dan pengembangan mata pencaharian alternatif pada tiga subsektor**.

Simulasi JAPOS terhadap dampak skenario kebijakan kelapa sawit berkelanjutan melalui NDP yang dikombinasikan dengan intensifikasi, sertifikasi, dan ragam skema insentif maupun disinsentif; menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat menurunkan deforestasi kumulatif sebesar 112 ribu ha (100% dari BAU) dan emisi sebesar 8,37 juta ton CO₂e (90% dari BAU). Meskipun ada penurunan produksi CPKO (*crude palm kernel oil*) yang disebabkan oleh kebijakan ini, penurunan ini dapat diatasi dengan melakukan peningkatan intensifikasi dan insentif hingga tercapainya keseimbangan (ekuilibrium) antara aspek ekonomi dan lingkungan.